

Biden Khawatir Kemunduran Demokrasi di Seluruh Dunia

WASHINGTON DC (IM) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan kekhawatirannya pada kemunduran demokrasi di seluruh dunia pada Jumat (10/12). Dia menyerukan sesama pemimpin dunia bekerja dengannya untuk meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi.

Komentar Biden disampaikan kepada lebih dari 100 pemimpin pada pertemuan virtual pertama untuk Demokrasi di Gedung Putih. "Apakah kita akan membiarkan kemunduran hak dan demokrasi terus berlanjut? Atau akankah kita bersama-sama memiliki visi dan keberanian untuk sekali lagi memimpin pawai kemajuan manusia dan kebebasan manusia ke depan?" katanya.

Dalam kesempatan itu Biden tidak secara terang-terangan menyebut nama China atau Rusia. Namun, dia telah berulang kali menyatakan AS dan sekutu yang berpikiran sama perlu menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi adalah kendaraan yang jauh lebih baik bagi masyarakat daripada oktrasi.

Biden menggarisbawahi negara-negara demokrasi yang sudah lama berdiri sekalipun, seperti AS, belum cukup terhadapan ketegangan. Dia menyebut momen itu sebagai titik balik dalam sejarah.

Pernyataan ini merujuk pada momen ketika pejabat terpilih lokal mengundurkan diri pada tingkat yang mengkhawatirkan di tengah konfrontasi dengan suara-suara marah di rapat dewan sekolah, kantor pemilihan, dan balai kota. Negara-negara bagian mengesahkan undang-undang untuk membatasi akses ke surat suara sehingga lebih sulit bagi orang Amerika untuk memilih.

Terlebih lagi serangan 6 Januari di Capitol yang telah membuat banyak orang di Partai Republik Donald Trump berpegang teguh pada klaim palsu tentang pemilihan yang dicurangi. Kondisi ini mengikis kepercayaan pada

keakuratan suara. "Di sini, di Amerika Serikat, kami juga tahu memperbarui demokrasi dan memperkuat institusi demokrasi kami membutuhkan upaya terus-menerus," kata Biden.

Presiden AS mengumumkan telah meluncurkan inisiatif untuk membelanjakan hingga 424 juta dolar AS untuk program di seluruh dunia. Program ini dirancang untuk mendukung media independen, kerja anti-korupsi, dan banyak lagi.

Beberapa pendukung juga ingin Biden lebih fokus menopang demokrasi di dalam negeri. Satu ujian awal datang ketika House of Representatives menyetujui Protecting Our Democracy Act, yang ketiga dari tiga undang-undang sebagian besar didukung oleh Demokrat. Ketiganya diperkirakan akan terhenti oleh Partai Republik di Senat.

"Di sini, di Amerika Serikat, kita tahu demokrasi kita tidak kebal dari ancaman," kata Wakil Presiden Kamala Harris dalam sambutannya untuk menutup hari pertama pertemuan.

"6 Januari tampak besar dalam hati nurani kolektif kita dan undang-undang anti-pemilih yang telah disahkan banyak negara bagian adalah bagian dari upaya yang disengaja untuk mengecualikan orang Amerika dari partisipasi dalam demokrasi kita," ujarnya.

Acara yang diselenggarakan AS ini pun mendapat reaksi keras dari musuh utama dan negara-negara lain yang tidak diundang. Para duta besar untuk AS dari China dan Rusia menulis esai bersama yang menggambarakan pemerintahan Biden menunjukkan mentalitas Perang Dingin yang akan membangkitkan konfrontasi ideologis dan keretakan di dunia.

Pemerintah juga menghadapi pengawasan atas cara memutuskan negara mana yang akan diundang. Tiongkok dan Rusia termasuk di antara mereka yang tidak menerima undangan. • tom



KUIL WAT ARUN DI BANGKOK - THAILAND
Kuil Wat Arun terlihat saat senja di tepi Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, Kamis (9/12).

Tentara Myanmar Bakar Belasan Warga Sipil Hingga Tewas

Tentara Myanmar dilaporkan kumpul-kumpul warga dan mengingrat mereka sebelum dibakar.

YANGON (IM) - Militer Myanmar dilaporkan menyerang sebuah desa kecil bernama Done Taw di wilayah Sagaing, barat laut negara. Saksi mata mengatakan, junta mengumpul-kumpul warga sipil di desa tersebut, dan mengikat tangan mereka. Ada yang menyebut mereka dibakar hidup-hidup sebagai pembalasan atas serangan terhadap konvoi militer.

Sebuah video setelah serangan Rabu (8/12) lalu menunjukkan 11 tubuh hangus terbakar. Beberapa orang diyakini remaja. Jasad hangus itu berbaring melingkar di tengah-tengah sisa-sisa gubuk di desa kecil tersebut.

Kemarahan terhadap junta kemudian menyebar luas setelah foto-foto tersebar di media sosial. Ini merupakan serangan militer terbaru yang semakin brutal dalam upaya memadamkan perlawanan anti-pemerintah.

Pada Kamis (9/12), Human Rights Watch menyerukan komunitas internasional untuk memastikan komandan yang memberi perintah pembunuhan ditambahkan ke daftar sanksi yang ditargetkan. Lebih luas lagi, upaya ditingkatkan untuk memotong sumber pendanaan apa pun untuk militer.

"Kontak kami mengatakan ini hanya anak laki-laki dan remaja yang merupakan pen-

diduk desa yang ditangkap di tempat yang salah pada waktu yang salah," kata juru bicara HRW, Manny Maung.

Dia mengatakan, insiden serupa telah terjadi secara teratur, namun insiden kali ini kebetulan tertangkap kamera. "Insiden ini cukup berani, dan itu terjadi di daerah yang dimaksudkan untuk ditemukan, dan dilihat, untuk menakut-nakuti orang," katanya.

Kendati demikian foto-foto dan video itu tidak dapat diverifikasi secara independen, namun akun yang diberikan kepada The Associated Press oleh seseorang yang mengatakan bahwa dia hadir ketika mereka mengambil foto-foto dengan deskripsi insiden yang dimuat oleh media independen Myanmar. Pemerintah telah membantah bahwa mereka memiliki pasukan di daerah itu.

Pengumpulan militer dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi awalnya ditekam dengan aksi protes rakyat tanpa kekerasan. Namun setelah polisi dan tentara merespons dengan kekuatan mematikan, kemarahan rakyat meningkat. Banyak dari mereka mengangkat senjata untuk membela diri.

Pembunuhan di Done Taw ditekam oleh Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) yang telah memantapkan dirinya sebagai pemer-

intah alternatif negara itu menggantikan pemerintah militer. Juru bicara (NUG) Dr. Sasa mengatakan, sebuah konvoi militer telah terkena bom pinggir jalan dan pasukan membalas pertama dengan menembaki Done Taw, kemudian menyerang desa, dan menangkap siapa pun yang dapat mereka tangkap.

Dia mengatakan para korban berkisar antara usia 14 hingga 40 tahun. "Adegan-adegan memuakkan yang mengingatkan pada kelompok teroris ISIS menjadi saksi eskalasi militer atas tindakan teror mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Kebrutalan, kebiadaban, dan kejahatan dari tindakan-tindakan ini menunjukkan kedalaman kebrokekan baru, dan membuktikan bahwa terlepas dari kepura-puraan relatif

detente yang terlihat selama beberapa bulan terakhir, junta tidak pernah berniat untuk mengurangi kampanye kekerasan mereka," kata Sasa melanjutkan.

Saksi mata yang berbicara kepada Associated Press mengatakan, sekitar 50 tentara berbaris ke desa Done Taw sekitar pukul 11 pagi Selasa. Tentara menangkap siapa saja yang tidak berhasil melarikan diri.

"Mereka menangkap 11 warga desa yang tidak bersalah," kata saksi yang menyebut dirinya sebagai petani dan aktivis dan meminta untuk tidak disebutkan namanya demi keselamatannya sendiri.

Dia menambahkan bahwa orang-orang yang ditangkap bukanlah anggota Pasukan Pertahanan Rakyat yang terorganisir secara lokal. Dia mengatakan para tawanan diikat

di belakang mereka dan dibakar.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan pembunuhan mengerikan 11 orang. Dia juga mengutuk keras kekerasan itu dan mengatakan laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lima anak termasuk di antara orang-orang yang terbunuh.

Dujarric mengingatkan otoritas militer Myanmar akan kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk memastikan keselamatan dan perlindungan warga sipil.

Dia juga meminta mereka yang bertanggung jawab atas tindakan keji ini untuk dimintai pertanggungjawabannya. • tom

PBB Hentikan Bantuan Pangan di Dua Kota Ethiopia

ADDIS ABABA (IM) — Program Pangan Dunia (WFP) telah menangguhkan distribusi bantuan makanan di dua kota utara Ethiopia setelah sekelompok orang bersenjata menjarah gudang-gudangnya. Penjarah dari kelompok pemberontak Tigrayan menahan staf bantuan PBB di bawah tongkang senjata di Kombolcha.

Mereka mencuri persediaan makanan penting dalam jumlah besar, termasuk beberapa untuk anak-anak yang kekurangan gizi. Wilayah utara di Ethiopia menghadapi kelaparan massal di tengah perang saudara yang sedang berlangsung antara Tigrayan dan pasukan pemerintah. Setelah lebih dari satu tahun pertempuran, lebih dari sembilan juta orang membutuhkan pasokan makanan penting.

Seorang juru bicara PBB yang menjalankan WFP mengatakan stafnya di sana telah menghadapi intimidasi ekstrem selama sehari-hari penjarahan. Ia menambahkan peleccehan staf kemanusiaan seperti itu oleh angkatan ber-

senjata tidak dapat diterima. Hal itu merusak kemampuan PBB dan semua mitra kemanusiaan untuk memberikan bantuan ketika itu paling dibutuhkan. Juru bicara itu juga menuduh pasukan pemerintah mengomandoi tiga truk kemanusiaan WFP dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Apa yang terjadi membuat keputusan untuk menghentikan distribusi makanan di Kombolcha dan Dessie. Dua kota strategis di wilayah Amhara utara yang berada di jalan menuju Ibu Kota Addis Ababa.

Dilansir BBC pada Kamis (9/12), pemerintah Ethiopia baru-baru ini mengumumkan telah merebut kembali kota-kota dari pemberontak Tigray. Namun pemberontak mengatakan tentara hanya menemukan kembali daerah-daerah yang telah mereka tinggalkan.

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) terjadi lebih dari setahun yang lalu yang men-

dominasi Ethiopia selama beberapa dekade. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengirim pasukan ke wilayah Tigray untuk membubarkan TPLF setelah dia mengatakan telah menyerang kamp-kamp tentara.

Namun, pemberontak bangkit kembali, merebut kembali Tigray dan maju ke wilayah tetangga Amhara. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang. Kondisi ini membuat lebih dari dua juta orang kehilangan tempat tinggal dan mendorong ratusan ribu orang ke dalam kondisi kelaparan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price mengatakan bencana kemanusiaan di Ethiopia utara tetap menjadi prioritas mutlak bagi Washington. Ia meminta kedua belah pihak untuk merundingkan penghentian konflik dan mengizinkan bantuan dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan. • tom

Jurnalis Filipina Tewas Ditembak Saat Nonton TV

MANILA (IM) - Jurnalis Filipina yang membantu menyelidiki kampanye anti-narkoba pemerintah Presiden Rodrigo Duterte, Yesus "Jess" Malabanan, ditemukan tewas di rumahnya di Calbayog, sebuah kota di pulau tengah Samar, pada Kamis (9/12) malam.

Dia ditembak tepat di kepala saat sedang menonton televisi. Malabanan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun dia dinyatakan meninggal tak lama setelah tiba di sana.

Menurut keterangan kepolisian, terdapat dua pelaku yang terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Hingga berita ini dituliskan, mereka masih buron.

Saya bergabung dengan sesama jurnalis mengutuk pembunuhan Jess. Kejadian itu sama sekali tidak dapat diterima. Keadilan untuk Jess," kata Manny Mogato, seorang jurnalis yang pernah bekerja bersama dan berkolaborasi dengan Malabanan, dikutip laman Aljazeera.

Menurut Mogato, Malabanan banyak membantu Reuters dalam menyusun laporan tentang kampanye pemberantasan narkoba yang digencarkan pemerintahan Duterte. Mogato dan Malabanan tergabung dalam tim. Dalam laporannya, mereka mengungkap tindakan brutal aparat kepolisian Filipina saat menggelar operasi penangkapan atau penggerebekan terhadap terduga pengedar dan pengguna narkoba.

Laporan tersebut meraih 2018 Pulitzer Prize in International Reporting. Saat ini, kampanye pemberantasan narkoba pemerintahan Duterte yang menewaskan ribuan tersangka, menjadi subjek penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional.

National Union of Journalists in the Philippines (NUJP) turut mengutuk pembunuhan Malabanan. Mereka menyerukan agar kasus itu diurus hingga tuntas dan transparan.

Menurut data NUJP, sebelum kasus Malabanan, terdapat setidaknya 21 jurnalis Filipina yang terbunuh sejak Duterte menjadi presiden pada Juni 2016.

Pada Oktober lalu, misalnya, jurnalis media online dan komentator radio, Orlando Dinoy, dibunuh di apartemennya di wilayah selatan Davao. Daerah tersebut dikenal sebagai basis pendukung Duterte.

Terduga pelaku penyerangan Dinoy berhasil ditangkap. Dia kemudian didakwa dengan pasal pembunuhan. Seorang juru bicara pemerintah Filipina menyebut kasus pembunuhan Dinoy tidak terkait dengan pekerjaannya.

Menurut indeks impunitas yang disusun Committee to Protect Journalists, Filipina menempati urutan ketujuh di dunia dalam hal pembunuhan jurnalis yang belum terpecahkan. Selain Malabanan, terdapat 14 kasus pembunuhan jurnalis lainnya di sana yang belum terungkap. • tom



LOKASI SERANGAN UDARA ARAB SAUDI DI YAMAN
Penjaga berkumpul di luar sebuah gudang Rural Water Authority setelah terkena serangan udara yang dipimpin oleh Arab Saudi di Sanaa, Yaman, Kamis (9/12).



PEMUTARAN PERDANA FILM A JOURNAL FOR JORDAN
Roxanne Avent dan Deon Taylor berpose selama pemutaran perdana karpet merah "A Journal for Jordan" di New York City, AS, Kamis (9/12).

Malaysia Catat 11.207 Kasus Bangkrut Selama Pandemi

KUALA LUMPUR (IM) - Jumlah kebangkrutan di Malaysia sejak awal pandemi Covid-19 terhitung Maret 2020 hingga Oktober 2021 mencapai 11.207 kasus, menurut data statistik dari Departemen Kepailitan Malaysia. "Pandemi Covid-19 mengubah lanskap global dan juga mempengaruhi posisi keuangan antarindividu," ujar menteri yang membidangi parlemen dan hukum, Wan Junaidi di Putrajaya, Jumat (10/12).

Departemen Kepailitan Malaysia merupakan sebuah lembaga pemerintah di bawah Departemen Perdana Menteri yang diberi peran utama untuk mengurus kepailitan. Departemen Kepailitan Malaysia juga menangani kasus-kasus perusahaan yang memiliki perikatan pekerja yang pendaftarannya telah dicabut.

Wan membantah adanya perspektif dan pandangan beberapa komunitas tentang fakta bahwa Departemen Kepailitan Malaysia membuat seseorang bangkrut. "Seseorang hanya dapat dinyatakan pailit dengan penetapan pengadilan apabila suatu permohonan diajukan baik melalui permohonan dari kreditur atau secara sukarela oleh debitur sendiri," katanya.

"Berdasarkan perbandin-

gan empat tahun ke belakang, terjadi penurunan jumlah perkara kepailitan yang tercatat setiap tahunnya," katanya.

Hal ini terlihat ketika tercatat sebanyak 18.227 kasus pada 2017, sebanyak 16.482 kasus pada 2018, 12.051 kasus pada 2019 dan pada 2020 sebanyak 8.351 kasus. Di antara faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penurunan kasus kepailitan selama pandemi Covid-19 adalah moratorium oleh pemerintah, pengoperasian pengadilan hanya untuk kasus pidana secara fisik, perubahan ambang batas utang untuk kasus kepailitan yang telah meningkat menjadi RM100.000 (Rp340 juta) mulai 23 Oktober 2020.

Kemudian tindakan kebangkrutan telah terjadi paling lambat enam bulan sebelum pengajuan permohonan pailit yang utangnya sudah menunggak sebelum masa pandemi COVID-19. Wan mengatakan, selama 100 hari pemerintahannya Departemen Kepailitan Malaysia telah melakukan beberapa inisiatif di antaranya penyempurnaan dan publikasi ulang buku Referensi Cepat Kepailitan yang diluncurkan Kamis ini bersamaan dengan Program Aspirasi 100 Hari #KeluargaMalaysia di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC). • tom